

**PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL DAN JUMLAH PENDUDUK
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2015-2019**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Di susun Oleh

Nama : Liska Akhfa Diana

NPM : 1551010221

**PRODI EKONONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2020**

**PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL DAN JUMLAH PENDUDUK
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2015-2019**



Pembimbing I : Mardhiyah Hayati, S.P., M.Si.

Pembimbing II : Femei Purnamasari, S.E., M.Si.

**PRODI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2020**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya angka pengangguran di Provinsi Lampung. Menurut data yang diperoleh dari BPS provinsi Lampung angka pengangguran pada tahun 2019 sebanyak 171.455 jiwa. Banyaknya angka pengangguran disebabkan beberapa indikator yang mempengaruhinya yaitu upah minimum dan jumlah penduduk. Dengan banyaknya angkata kerja serta upah minimum yang selalu naik setiap tahunnya, seharusnya dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Lampung. Karena semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan semakin besar pula kontribusi perusahaan untuk merekrut pekerja yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan upah yang diberikan, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Jumlah Penduduk secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2015-2019, bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2015-2019, bagaimana tingkat pengangguran dalam perspektif ekonomi islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, dengan menggunakan anallisis regresi berganda. Data yang digunakan daam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder BPS Provinsi Lampung dan dianalisis menggunakan SPSS. Berdasarkan uji t diperoleh nilai $t = 6,290$ dengan nilai signifikansi yaitu $0,024 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) dan jumlah penduduk secara parsial terdapat pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dan signifikan. Selajutnya berdasarkan uji F diperoleh nilai $F = 168,177$ dengan nilai signifikansi yaitu $0,006 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) dan jumlah penduduk secara simultan terdapat pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dan signifikan. Pengangguran juga bisa terjadi karena adanya upah. Sistem ekonomi islam tidak sekedar memandang kerja sebagai pendorong utama aktivitas perekonomian, tapi lebih dari itu kerja merupakan perbuatan mulia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Bekerja merupakan perintah Allah SWT dan menjadi sunah Rosulallah SAW, dalam islam pengangguran merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT, karena islam mengajarkan manusia untuk bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan membantu sesama manusia. Bekerja dalam sistem ekonomi islam merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim sebagai kewajiban syara" dan dipandang sebagai bentuk ibadah bagi yang melakukannya.

Kata Kunci: *Upah Minimum Regional, Jumlah Penduduk, Pengangguran*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS UPAH MINIMUM REGIONAL DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN
DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM PERIODE 2015-2019**

Nama : LISKA AKHFA DIANA

NPM : 1551010221

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I.
NIP. 197605292008012010

Pembimbing II

Femei Purnamasari, S.E., M.Si.
NIP. 198405212015032004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS UPAH MINIMUM REGIONAL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2015-2019”** disusun oleh, **Liska Akhfa Diana, NPM: 1551010221,**

Prodi: Ekonomi Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

Rabu, 16 Desember 2020

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Madnasir, S.E., M.S.I

Sekretaris : Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak

Penguji I : Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M

Penguji II : Mardhiyah Hayati, S.P., M.Si

Mengetahui
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Abdul Ghofur, M.S.I
198008012003121001

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya : “dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh apa yang telah diusahakannya”

(Q.S. An-Najm[53] : 39)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada :

1. Kepada orang tuaku tercinta, ayah Munasir, S.Ag., dan ibu Nur Kusniati, terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta doa kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan ku disetiap waktuku menuntut ilmu.
2. Adikku Rahma Laila Faiza dan Khansa Atika Khoerunnisa yang tiada hentinya memberiku dukungan, semangat serta doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta, tempat ternyaman dan terbaik dalam menimba ilmu, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin maju, berkarya dan berkualitas dalam mendidik putra-putri Indonesia.
4. Bapak/ibu dosen yang selama ini telah menuntunku ke jalan yang lurus, memberikan ilmunya kepadaku dengan rasa tulus. Engkaulah sang pejuang sejati.
5. Sahabat seperjuangan angkatan 2015 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan menjadi alumni yang memberi manfaat bagi bangsa.

RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugerahi nama oleh kedua orang tua yaitu Liska Akhfa Diana. Dilahirkan di Desa Sukosari kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah. Pada tanggal 27 Januari 1997 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan ayah Munasir, S.Ag., dan ibu Nur Kusniati. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Pendidikan Taman Kanak-kanak di tempuh di TK ABA Sridadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2003
2. Pendidikan sekolah dasar ditempuh di MI M Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2009.
3. Melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah 02 Kalirejo Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2013 melanjutkan ke sekolah menengah atas di MAN 1 Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2015.
5. Kemudian pada tahun 2015 meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Pada Prodi Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Upah Minimum Regional Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2015-2019” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Ekonomi Islam. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa di haturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Mardhiyah Hayati, S.P., M.Si. dan Femei Purnamasari, S.E., M.Si., selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini.

4. Bapak Ibu Dosen serta Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
5. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lainlain.
6. Pakde Arif Udin, Bude Erna Rusmawati, Om Sholeh Udin, Bulek Eni Amiati, Om Suhari, Bulek Fitri Asih, Kakak Sepupu Ida Fitriani dan adikku M.Husain Alamul Huda dan Octa Alya Zahra Safitri.
7. Sahabat seperjuanganku Tina Ratnasari, Kusuma Retno Sumekar, Atika Marta Andani, Vina Yupesa Diana, Pristya Ningsih, Della Aprilia, Devi Agustin dan Danang Galih Pamungkas yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan, UTS dan UAS hingga proses skripsi. Kalihan terindah yang selalu memberi dukungan kepada penulis agar selalu dan terus semangat dalam perkuliahan khususnya penulisan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang telah membantu yang tak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam Ukhuwah Islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang khazannah Ekonomi Islam.

Kalirejo, September 2020

Liska Akhfa Diana

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasana Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	15
BAB II LANDASA TEORI	
A. Konsep Pengangguran	17
1. Pengertian Pengangguran	17
2. Tingkat Pengangguran	19

3.	Jenis-jenis Pengangguran	20
4.	Dampak Pengangguran	22
5.	Tingkat Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam	22
B.	Konsep Upah Minimum	26
1.	Dasar Hukum Upah Minimum	26
2.	Penetapan Umah Minimum	28
3.	Teori Upah	29
4.	Upah Minimum dalam Perspektif Ekonomi Islam	32
C.	Konsep Jumlah Penduduk	34
1.	Pengertian Jumlah Penduduk	34
2.	Dampak Jumlah Penduduk	35
3.	Menentukan Laju Pertumbuhan Penduduk	38
4.	Jumlah Penduduk dalam Perspektif Ekonomi Islam	38
D.	Hubungan Upah Minimum, Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat pengangguran	39
E.	Penelitian Terdahulu	41
F.	Keranangka Berpikir	43
G.	Hipotesis	44
 BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis dan Pendekatn Penelitian	48
1.	Jenis Penelitian	48
2.	Pendekatan Penelitian	49
B.	Populasi dan Sampel	49

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian	50
D. Metode Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	58
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
2. Topografi	59
3. Sejarah Singkat Provinsi Lampung	61
4. Sector Ekonomi Provinsi Lampung	63
B. Gambaran Penelitian	63
1. Upah Minimum Regional	64
2. Jumlah Penduduk	66
3. Pengangguran	67
C. Hasil Analisis Data	68
1. Hasil Uji Asumsi Klasik	68
a. Uji Normalitas	69
b. Uji Multikolinieritas	70
c. Uji Autokorelasi	71
d. Uji Heterokedastisitas	71
2. Koefisien Determinasi (R^2).....	72
3. Analisis Regresi Linier Berganda	73
4. Hasil Uji Hipotesis	74
a. Uji Secara Parsial (Uji t)	74

b. Uji secara Simultan (Uji F)	75
D. Pembahasan	76
1. Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Jumlah Penduduk secara Parsial terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2005-2019	76
2. Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2005-2019	80
3. Pengaruh Tingkat Pengangguran dalam Perspektif ekonomi Islam ..	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatra periode 2015-2019	6
1.2. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2015-2019	7
1.3. Jumlah Penduduk di provinsi Lampung dengan Usia 15-64 tahun yang Bekerja	9
1.4. Jumlah Pengangguran di provinsi Lampung	10
1.5. UMR di Provinsi Lampung	12
1.6. Persentase Peningkatan UMR di provinsi Lampung	12
1.7. Jumlah Penduduk di provinsi Lampung	13
3.1. Definisi Operasional Variabel	51
4.1. Daftar Gubernur Provinsi Lampung	63
4.2. UMR di Provinsi Lampung	65
4.3. Persentase Peningkatan UMR di provinsi Lampung	66
4.4. Jumlah Penduduk di provinsi Lampung	67
4.5. Jumlah Penduduk di provinsi Lampung dengan Usia 15-64 tahun yang Bekerja	68
4.6. Jumlah Penganggura di provinsi Lampung	69
4.7. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	70
4.8. Hasil Uji Multikolinieritas	71
4.9. Hasil Uji Autokorelasi	72
4.10. Hasil Uji Heteroskedastisitas	73

4.11. Hasil Uji Determinasi	74
4.12. Analisis Regresi Linier Berganda	75
4.13. Uji t	76
4.14. Uji F	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka pikir43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. UMR di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 serta Persentase peningkatan UMR di Provinsi Lampung
2. Data Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung tahun 2015-2019
3. Data Jumlah Pengangguran di Provinsi Lampung dengan usia 15-64 Tahun
4. Hasil Uji asumsi Klasik
5. Koefisien Determinasi
6. Analisis Regresi Linear Berganda
7. Hasil Uji Hipotesis
8. Nilai-nilai Untuk Distribusi F
9. SK Pembimbing
10. Kartu Konsultasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya penegasan arti dan makna dari istilah-istilah yang terkait dalam skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2015-2019”** maka perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berikut:

1. **Pengaruh** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. **Upah Minimum Regional** adalah salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi tenaga kerja, guna meningkatkan taraf hidup.²

¹ Agus Irianto. Statistik, konsep dasar, aplikasi dan pengembangannya. (Jakarta: Kencana, 2016) h. 165.

² Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 2004) h. 195

3. **Kependudukan** adalah angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.
4. **Pengangguran** merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum memulai bekerja.³
5. **Perspektif Ekonomi Islam** adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip – prinsip dan nilai – nilai Aquran dan Sunnah.⁴

Penegasan judul diatas, maka yang dimaksud dari skripsi ini adalah memberikan gambaran bagaimana pengaruh upah minimum regional dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung dalam perspektif Islam tahun 2015-2019.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Alasan penelitian ini dilakukan di provinsi Lampung meninjau bahwa tingkat pengangguran terbuka se Sumatera provinsi Lampung mengalami penurunan disetiap tahunnya dan menduduki terendah 6 sebesar 4,03% dari 10 provinsi di pulau Sumatera. Namun meskipun mengalami penurunan tingkat pengangguran se-Sumatera, keadaan

³Mankiw Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat 2006), h.154

⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 19.

tingkat pengangguran terbuka di provinsi Lampung masih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja, serta adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja yang ditunjukkan dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi sebesar 8,15% pada jenjang pendidikan perguruan tinggi, sementara TPT terendah sebesar 1,18% terdapat pada penduduk berpendidikan SD kebawah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mempengaruhi jumlah angkatan kerja. Bertambahnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja akan meningkatkan angka pengangguran.

2. Alasan Subjektif

- a. Karena judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian memiliki kemudahan akses serta letak objek penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Suatu proses pembangunan dinyatakan berhasil apabila terjadi kenaikan pendapatan masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan

kesempatan kerja dan kestabilan harga. Agar hal ini bisa tercapai, maka sangat diperlukan peran serta pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan agar tujuan atau sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Peran pemerintah di sini dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, maupun kebijakan-kebijakan lain yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian secara nasional. Masalah ketenagakerjaan memang sangat luas dan kompleks. Sebelum krisis ekonomi, Indonesia sudah tergolong sebagai negara bermasalah dengan ketenagakerjaan karena tingginya pertumbuhan penduduk. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja sehingga berdampak pada tingginya jumlah pengangguran.⁵ Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi yang utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dalam mencapai sesuatu kesejahteraan salah satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang mendukung dan adanya pemerataan pendapatan di masyarakat.⁶

Pasal 27 ayat 2 UUD tahun 1945 tentang tenaga kerja, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 tentang pengangguran, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan

⁵ Ade Mulyani. 2007. *Profil Pengangguran dan Pasca Krisis Ekonomi 1998 di Provinsi Sumatra Barat*. Padang.

⁶SyahrinaSyam, Abdul Wahab, *Op.Cit.* h.36

kerja. Hal ini berarti, bahwa secara konstitusional, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dalam jumlah yang cukup, produktif dan remuneratif. Kedua pasal UUD 1945 ini perlu menjadi perhatian bahwa upaya-upaya penanganan pengangguran yang telah dilaksanakan selama ini masih belum memenuhi harapan, serta mendorong segera dapat dirumuskan konsepsi penanggulangan pengangguran.⁷

Pembangunan dilaksanakan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran.⁸ Tingginya angka pengangguran dapat membawa bangsa berada pada kehancuran yang sulit dihindarkan. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka tidak saja negara tidak menjalankan kewajiban dasarnya dengan baik. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.⁹ Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat dari jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan perkapita suatu negara. Di pulau Sumatera terdapat kesenjangan antara kesempatan kerja dengan

⁷<http://rzaharani.blogspot.co.id/2012/05/pengangguran-di-indonesia.html?m=1> ,20 April 2010, 12.04.

⁸ Edyson Susanto, Eny Rochaida dan Yana Ulfah. *Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan*. (Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman: 20117). Vol. 13 (1), h. 19-27.

⁹Muhammad Norholes. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi JawaTimur tahun 2008-2014". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No. 1 (Juni, 2014)

angkatan kerja terjadi karena peningkatan jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja yang meningkat lebih cepat, hal ini akan berdampak pada terciptanya pengangguran.¹⁰ Hal tersebut dapat kita lihat pada kondisi perkembangan tingkat pengangguran di Pulau Sumatera dibawah ini :

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera
periode 2015-2019

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	9,93	7,57	6,57	6,34	6,17
2	Kepulauan Riau	6,20	7,69	7,16	8,04	7,50
3	Riau	7,83	7,43	6,22	5,98	5,76
4	Sumatra Utara	6,71	5,84	5,60	5,55	5,39
5	Sumatra Barat	6,89	5,09	5,58	5,66	5,38
6	Sumatra Selatan	6,07	4,31	4,39	4,27	4,53
7	Lampung	5,14	4,62	4,33	4,04	4,03
8	Jambi	4,34	4,00	3,87	3,73	4,06
9	Kep. Bangka Belitung	6,29	2,60	3,78	3,61	3,58
10	Bengkulu	4,91	3,30	3,74	3,35	3,26

Sumber : BPS Provinsi Sumatera 2019

Dari tabel di atas menyatakan bahwa persentase jumlah pengangguran terbuka di pulau sumatera pada 10 provinsi mengalami fluktasi dan berbeda-beda antara provinsi dari tahun 2015-2019. Provinsi Lampung pada tahun 2015 tingkat pengangguran pada peringkat 8 sebesar 5,14% dan terendah Provinsi Jambi sebesar 4,34%, provinsi Lampung pada tahun 2016 tingkat pengangguran pada peringkat 6 sebesar 4,62% dan terendah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,60%, provinsi Lampung pada tahun 2017 tingkat pengangguran pada peringkat 7 sebesar 4,33% dan terendah provinsi Bengkulu sebesar 3,74%, provinsi Lampung pada

¹⁰Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

tahun 2018 tingkat pengangguran pada peringkat 7 sebesar 4,04% dan terendah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,35%, Provinsi Lampung pada tahun 2019 tingkat pengangguran pada peringkat 8 sebesar 4,03% dan terendah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,26%. Dalam kurun waktu lima tahun nilai persentase di provinsi Lampung mengalami penurunan pengangguran tetapi mengalami perubahan peringkat, dimana peringkat tertinggi pada tahun 2016 yaitu pada peringkat 6 dengan perentase terendah tahun 2019 sebesar 4,03%.

Orang yang menganggur dapat didefinisikan orang yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, sedang menunggu panggilan kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan atau sedang menunggu untuk melapor atas pekerjaan yang baru dalam waktu 4 minggu¹¹. Teori makro ekonomi, masalah pengangguran dibahas pada dasar tenaga kerja yang juga dihubungkan dengan keseimbangan antara tingkat upah tenaga kerja. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Terjadinya pengangguran akan menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah kemiskinan, menurunkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

¹¹ Sandy Dharmakusuma. *Trade Off Antara Inflasi dan Tingkat Pengangguran*. Gema Stikubank. November 2018., h. 43-68.

Berikut adalah kondisi tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di provinsi Lampung periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Lampung barat	3,55	2,73	0,96	2,76	1,68
2	Tanggamus	5,15	6,58	5,08	2,23	2,98
3	Lampung selatan	5,38	5,72	4,80	4,49	4,75
4	Lampung timur	4,49	4,74	3,80	3,38	2,89
5	Lampung tengah	2,94	2,72	3,08	2,52	2,62
6	Lampung utara	7,62	6,55	5,62	4,87	5,09
7	Way kanan	3,53	3,44	2,88	4,45	3,60
8	Tulang bawang	5,59	4,7	3,47	3,53	4,04
9	Pesawaran	7,21	7,92	5,73	4,64	4,42
10	Pringsewu	3,83	3,18	4,63	4,13	4,95
11	Mesuji	5,06	2,9	0,65	3,80	3,62
12	Tulang bawang barat	2,61	3,83	1,83	2,93	3,59
13	Bandar lampung	8,51	8,4	8,1	7,28	7,12
14	Metro	5,12	4,68	4,64	5,79	5,11

Sumber : Data Olah pada BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi tingkat pengangguran dari tahun 2015-2019 di provinsi lampung dalam kurun lima tahun terakhir mengalami fluktsasi terhadap kabupaten/kota yang berbeda-beda. Dilihat pada tahun 2015-2019 tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di kota bandar lampung pada tahun 2015 sebesar 8,15%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah terdapat di kabupaten/kota mesuji pada tahun 2017 sebesar 0,65%.

Jumlah penduduk dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi penduduk usia kerja (15-64 tahun), dan bukan usia kerja, yang termasuk kedalam kelompok bukan usia kerja (usia non produktif) yaitu usia 0-14

tahun dan manusia lanjut usia (manula) yang berusia = 65 tahun. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) diketahui data jumlah penduduk provinsi Lampung dengan usia 15-64 tahun yang merupakan angkatan kerja dan yang bekerja (jiwa) dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Dengan Usia 15-64
Tahun yang Bekerja

No	Tahun	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Bekerja
1	2015	3.635.258	3.438.408
2	2016	3.931.321	3.740.974
3	2017	3.896.230	3.719.973
4	2018	4.060.377	3.888.688
5	2019	4.077.930	3.906.475

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2015-2019¹²

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun penduduk bekerja mengalami peningkatan. Dari jumlah penduduk usia kerja yang masuk angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. Sebagian yang tidak bekerja (dengan berbagai alasan) tidak masuk angkatan kerja. Tidak semua angkatan kerja memperoleh lapangan pekerjaan, mereka inilah yang disebut pengangguran.

Berdasarkan data jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja maka diperoleh jumlah pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

¹² BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pringsewu. <http://lampungprov.bps.go.id>

Tabel 1.4
Jumlah Pengangguran di Provinsi Lampung

No	Tahun	Jumlah Pengangguran (dalam Jiwa)
1	2015	196.850
2	2016	190.347
3	2017	176.257
4	2018	171.689
5	2019	171.455

Sumber : Olah Data BPS Provinsi Lampung 2015-2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Lampung mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2019, keadaan seperti ini diasumsikan dapat mempengaruhi perekonomian di Provinsi Lampung tahun 2015-2019. Data tersebut menunjukkan bahwa provinsi Lampung menduduki peringkat ke lima selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2015-2019 dari sepuluh provinsi di Sumatera dan pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka provinsi Lampung merupakan TPT terendah keempat dengan tingkat pengangguran sebesar 4.03%.¹³

Masalah pengangguran merupakan masalah yang berkaitan dalam bidang ekonomi. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada.¹⁴ Masalah pengangguran merupakan masalah yang berkaitan dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, masalah pengangguran juga berhubungan dengan bidang sosial dan pendidikan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pun menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka

¹³ BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pringsewu. <http://lampungprov.bps.go.id>

¹⁴ Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008),

pengangguran. Nurul Huda menyatakan bahwa saat ini ada kecenderungan bahwa sarjana lulusan perguruan tinggi lebih banyak yang menganggur daripada bekerja.¹⁵ Seperti halnya yang terjadi di provinsi Lampung, tingkat pengangguran terbuka tertinggi disandang oleh lulusan pendidikan tinggi. Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi sebesar 8,15% pada jenjang pendidikan perguruan tinggi, sementara TPT terendah sebesar 1,18% terdapat pada penduduk berpendidikan SD kebawah.¹⁶ Pendidikan seseorang meningkatkan produktivitas seseorang sehingga meningkatkan output, ketika peningkatan output maka akan memberikan efek pada peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.¹⁷

Menurut Mankiw bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja (khususnya yang tidak berpengalaman dan tidak terdidik) yang diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran.¹⁸ Upah merupakan salah satu faktor yang jika dilihat dari sisi penawaran ketenaga kerjaan mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja. Besarnya upah yang di tawarkan suatu perusahaan biasanya di tentukan oleh tingkat produktivitas, kualitas dan waktu kerja para tenaga kerja itu sendiri.

¹⁵ Nurul Huda, et. al., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), h. 174.

¹⁶ Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

¹⁷ Dian Priastivi Herniwati Retno Handayani, "Analisis Pengaruh Jumlah penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan Pdrb Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah", *Journal Of Economics*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, h. 159

¹⁸ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi Edisi Keenam, Macroeconomics 6th Edition*, Terjemahan Fitria Liza dan Imam Nurmawan (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 161.

Berdasarkan daftar UMR se Sumatera diperoleh data bahwa UMR tertinggi pada tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 2.976.705 sedangkan terendah di Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 2.040.000 dan untuk provinsi Lampung sebesar 2.241.269 dengan menduduki peringkat 9. Berdasarkan data BPS provinsi Lampung perkembangan tingkat upah di Provinsi Lampung terlihat mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan kenaikan upah setiap tahunnya maka kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan imbang dengan taraf hidup masyarakat disuatu wilayah meningkat. Upah di Provinsi Lampung tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5
UMR di Provinsi Lampung

No	Tahun	UMP (Perbulan)	Kenaikan
1	2015	1.581.000	182.000 dari tahun 2014
2	2016	1.763.000	182.000 dari tahun 2015
3	2017	1.908.447	145.477 dari tahun 2016
4	2018	2.074.673	166.226 dari tahun 2017
5	2019	2.241.269	166.596 dari tahun 2018

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2015-2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan upah minimum setiap tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2014 upah minimum sebesar Rp 1.399.000 dimana tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 182.000 dari tahun sebelumnya, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 145.477 dari tahun sebelumnya, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 166.226 dari tahun sebelumnya dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 166.596 dari tahun sebelumnya.

Sedangkan persentase peningkata upah minimum dari tahun 2015 sampai 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Persentase Peningkatan UMR di Provinsi Lampung

No	Tahun	Persentase Kenaikan UMP (%)
1	2015	13,01
2	2016	11,51
3	2017	8,25
4	2018	8,71
5	2019	8,03

Sumber : Olah Data BPS Provinsi Lampung 2015-2019

Naik dan turun persentase peningkatan upah minimum dari tahun ke tahun mengalami perubahan setiap tahunnya. Tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami persentase penurunan penambahan upah minimum, tahun 2018 mengalami peningkatan dan turun kembali di tahun 2019.

Upah mempengaruhi terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan dalam proses produksi dan akan mencari tenaga kerja yang terdidik dan lebih berpengalaman.¹⁹ Selain itu, Temuan empirik baru yang dihasilkan SMERU *Research Institute* dan *Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas* bahwa kenaikan upah minimum lebih dinikmati oleh pekerja terdidik dibanding pekerja tidak terdidik karena perusahaan cenderung melakukan substitusi antar tenaga kerja dan antar tenaga kerja dengan

¹⁹ N. Gregory Mankiw, Op. Cit, h. 205.

mesin.²⁰ Sehingga seharusnya kenaikan upah minimum justru akan menurunkan pengangguran terdidik, karena standar upah yang tinggi, perusahaan lebih memilih seseorang yang terdidik dan memiliki pengalaman untuk menjadi bagian dalam perusahaannya yang akan sebanding dengan apa yang telah perusahaan bayarkan.

Selain faktor upah, faktor pertambahan penduduk dan tingkat kerja mempengaruhi masalah pengangguran dan perluasan kesempatan kerja. Angkatan kerja yang terus menerus bertambah dapat menimbulkan masalah dalam perluasan dasar ekonomi.²¹ Pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang akan berpartisipasi dalam pembangunan atau dapat dikatakan jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja akan semakin bertambah. Bertambahnya angkatan kerja yang tidak diikuti dengan tersedianya lapangan dan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran.

Jumlah tingkat pengangguran serta angkatan kerja menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang harus diikuti sertakan dalam proses pembangunan yang berarti bahwa tingkat pengangguran dan angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk yang mampu menggerakkan roses ekonomi. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang besar bisa berarti bahwa

²⁰ Sonny Sumarsono, Op. Cit., h. 201.

²¹ Safuridar, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Aceh Timur", Jurnal Samudera Ekonomatika, Vol 1, No. 1. h. 95

input tenaga kerja atau jumlah angkatan kerja sudah cukup untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung.²²

Adapun jumlah penduduk tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Jumah Penduduk di Provinsi Lampung

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Kenaikan (Jiwa)
1	2015	8.117.268	91.077 dari tahun 2014
2	2016	8.205.141	87.873 dari tahun 2015
3	2017	8.289.577	84.436 dari tahun 2016
4	2018	8.370.485	80.908 dari tahun 2017
5	2019	8.447.737	77.252 dari tahun 2018

Sumber : Olah Data BPS Provinsi Lampung 2015-2019

Tabel di atas menunjukkan jika provinsi Lampung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk per tahun. Jumlah penduduk miskin di Lampung 2019 terbilang tinggi mencapai 12,62%. ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut akan berdampak terhadap tingkat pengangguran jika penduduk tidak mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap produksinya.

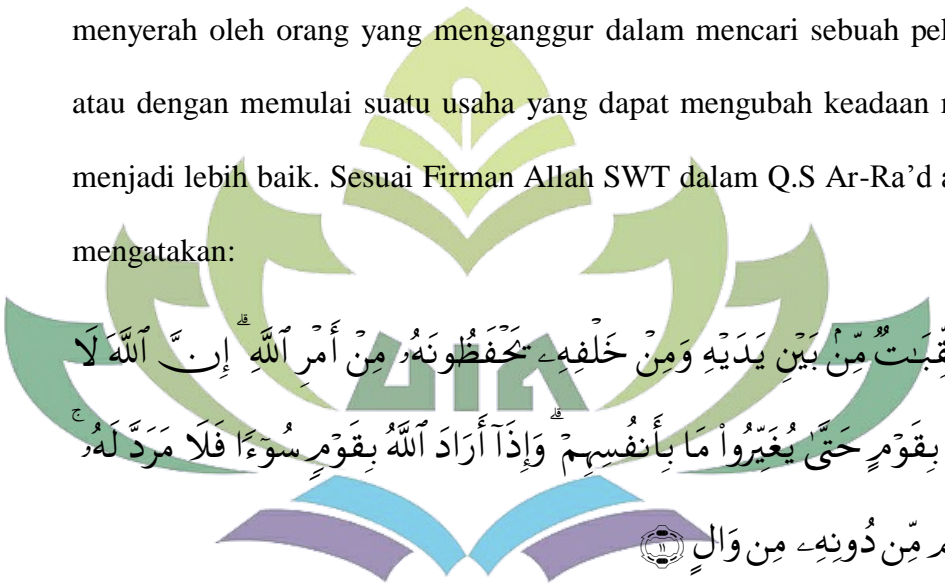
Menurut David Emile Durkheim bahwa pengangguran dan jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif, ketika jumlah penduduk meningkat maka akan ada persaingan setiap orang untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya.²³ Dampak perkembangan jumlah penduduk di kota Lampung dapat berpengaruh negatif, apabila masyarakat ingin bekerja keras demi mendapatkan pekerjaan atau

²²Laurensius Surya A U, Nanik Istiyani, Rafael Purtomo, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2014"

²³ Ayundha lindiarta, "analisis pengaruh tingkat upah, inflasi dan jumlah penduduk terhadap pengangguran dikota Malang " 2018, h.7.

meningkatkan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat diikuti pula dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat akan meningkatkan jumlah pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja.

Perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah oleh orang yang menganggur dalam mencari sebuah pekerjaan atau dengan memulai suatu usaha yang dapat mengubah keadaan mereka menjadi lebih baik. Sesuai Firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 11 mengatakan:



لَهُرَّ مَعْقَبَتٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya :*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*²⁴

Berdasarkan ayat di atas telah disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang jika orang tersebut tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Islam sangat

²⁴Departemen agama RI *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro 2010), h. 250

menentang menjadi seorang pengangguran. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak pernah menyerah dan selalu berusaha karena Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang kecuali dirinya sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Berusaha mencari pekerjaan yang halal, karena dengan bekerja akan ada upah atau penghasilan yang akan diperoleh sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan meningkatkan taraf hidupnya. Terkait uraian diatas, peneliti bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Islam tahun 2015-2019”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Jumlah Penduduk secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2015-2019?
3. Bagaimana tingkat pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Jumlah Penduduk secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2015-2019.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2015-2019.
- c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

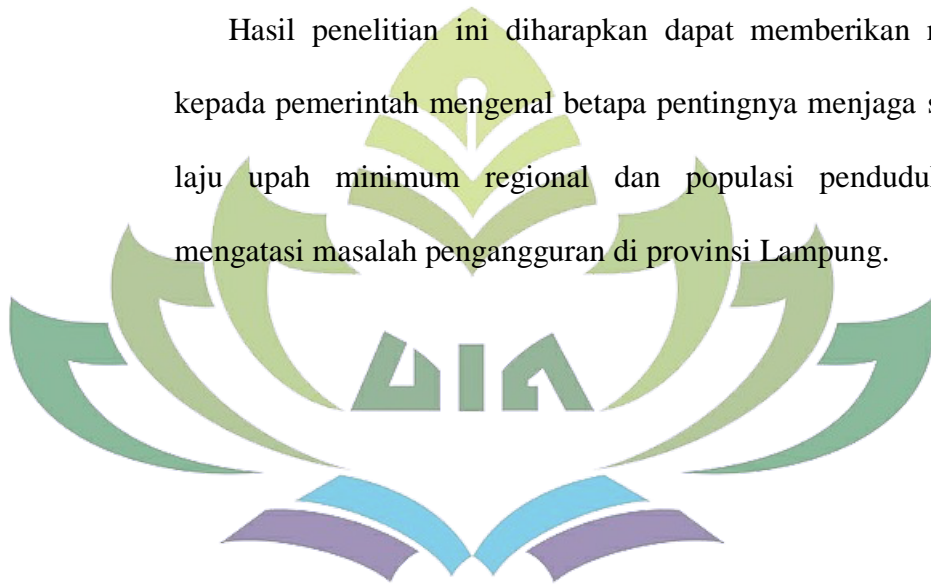
- a. Manfaat Teoritis
 - 1.) Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang analisis upah minimum dan populasi penduduk terhadap pengangguran.
 - 2.) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori ekonomi

islam, dalam rangka analisis upah minimum dan populasi penduduk terhadap tingkat pengangguran.

- 3.) Bagi peneliti baru, hasil penelitian dapat diakui sebagai bahan referensi persputakaan, untuk referensi perbandingan untuk kemungkinan peneliti topik-topik yang berkaitan yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenal betapa pentingnya menjaga stabilitas laju upah minimum regional dan populasi penduduk dapat mengatasi masalah pengangguran di provinsi Lampung.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pengangguran

1. Pengertian pengangguran

Menurut Thomas Carlyle pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja, dan tidak mampu mendapatkan pekerjaan, barangkali merupakan sisi paling suram bahwa ketidaksamaan keberuntungan muncul dibawah sinar matahari. Pengangguran adalah masalah ekonomi yang mempengaruhi manusia secara tidak langsung dan paling berat. Bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunnya standar kehidupan dan tekanan psikologis.²⁵

Menurut BPS bahwa pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan kenyataan yang dihadapi oleh Negara sedang berkembang, akan tetapi juga oleh Negara yang sudah maju. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.²⁶

²⁵Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi teori pengantar edisi tiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 366

²⁶Muana, Nanga. *Makro Ekonomi: teori, masalah dan kebijakan*. Edisi Revisi.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 253

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topic yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.²⁷ Seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai pengangguran. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.²⁸ Teori keynes disebutkan bahwa pasar tenaga kerja jauh dari kata seimbang, karena upah tidak pernah fleksibel, sehingga permintaan dan penawaran hampir tidak pernah seimbang sehingga pengangguran sering terjadi. Menurut keynes pengangguran bisa terjadi secara terus menerus.

Pengangguran juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Tidak mengejutkan bahwa pengangguran adalah topik perdebatan politik yang sering dibicarakan dan para politik sering mengklaim kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

²⁷ Mankiw. *Pengantar Ekonomi Makro (Edisi 3)*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 150.

²⁸ Sukirno. *Op. Cit.*, h, 472

2. Tingkat pengangguran

Jumlah penduduk dalam satu negara dapat dibedakan menjadi penduduk usia kerja (15-64 tahun), dan bukan usia kerja, yang termasuk kedalam kelompok bukan usia kerja (usia non produktif) yaitu usia 0-14 tahun dan manusia lanjut usia (manula) yang berusia lebih dari 65 tahun. Berdasarkan jumlah penduduk usia kerja yang masuk angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. Sebagian yang tidak bekerja (dengan berbagai alasan) tidak masuk angkatan kerja. Tidak semua angkatan kerja memperoleh lapangan pekerjaan, mereka inilah yang disebut pengangguran.²⁹

Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan.³⁰ Berbicaraan mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentase dari angkatan kerja. Membandingkan jumlah pengangguran diantara berbagai negara tidak ada manfaatnya karna ia tidak akan memberikan gambaran yang tepat tentang perbandingan masalah yang berlaku.

Dari data-data ketenagakerjaan dapat diketahui dan dihitung berbagai konsep yang berkaitan dengan tingkat pekerja dan tingkat pengangguran. Konsep-konsep yang dimaksud adalah tingkat partisipan angkatan kerja (TPAK): tingkat pengangguran (*employment*

²⁹Pratama Raharja, Mandala Manurung, *pengantar ilmu ekonomi edisi ketiga* (Jakarta:fakultas ekonomi Indonesia, 2008), h. 379

³⁰*Ibid.*

rate) dan tingkat pengangguran (*unemployment rate*). Angka-angka semacam ini berguna untuk mengenali situasi yang berlangsung dipasar tenaga kerja. Pemahaman tentang situasi pasar kerja berguna bukan saja bagi perumusan kebijaksanaan ketenagakerjaan dan menciptakan kesempatan kerja.³¹

3. Jenis-jenis pengangguran

Menurut Case and Fair pengangguran dapat dibedakan ke dalam beberapa 3 jenis yaitu:

a. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas bekerja.

b. Pengangguran Terselubung

Pengangguran terselubung adalah adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyak tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran ini juga bisa terjadi karena seorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.

³¹Dumairy, *perekonomian Indonesia* (Jakarta:erlangga, 1996), h. 79

c. Setengah Menganggur

Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Pendapat lain yang mengatakan bahwa setengah menganggur adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam dalam sehari.³²

Menurut Iskandar Putong pengangguran terdiri atas jenis yaitu:

a. Pengangguran Siklis

Pengangguran siklis yaitu pengangguran yang terjadi apabila permintaan terlalu rendah dari output potensial perekonomian.

b. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perputaran dalam lingkup pekerjaan dan ketenagakerjaan.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidak sesuaian antara struktur angkatan kerja, berdasarkan pendidikan dan keterampilan. Jenis kelamin, pekerjaan, industri, geografis, informasi dan tentu saja struktur permintaan tenaga kerja.³³

³²Riska Franita, "Analisis pengangguran di Indonesia". *Jurnal ilmu pengetahuan sosial*, vol. 1, (Desember 2015)

³³Iskandar Putong, *ekonomi makro, pengantar ilmu ekonomi makro vol. 1 dari ekonomi makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2003), h.169

4. Dampak pengangguran

Menurut Sudono Sikirmi bahwa dampak pengangguran sebagai berikut³⁴:

- a. Ditinjau dari segi ekonomi pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan, karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka sementara biaya hidup terus berjalan.
- b. Ditinjau dari segi sosial, dengan banyaknya pengangguran yang terjadi maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis serta pengamen yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal, karena sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak orang yang melakukan tindakan kejahatan.
- c. Ditinjau dari segi mental, dengan banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri, keputusan dan akan menimbulkan depresi.
- d. Ditinjau dari segi politik, akan banyaknya demonstrasi yang terjadi yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil, banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi.

5. Tingkat Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam

Selama ini orang beranggapan bahwa mengatasi masalah pengangguran adalah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi

³⁴ Sudono Sukirni, *Op.Cit*, h 13.

sebenarnya masalah tersebut bukanlah semata tugas dan tanggung jawab pemerintah saja melainkan tugas dan tanggung jawab semua pihak, termasuk tanggung jawab umat islam. Umat islam adalah umat yang baik dalam bekerja, karena diyakini kerja membangun diri pribadi, masyarakat, bangsa dan negara adalah pemerintah agama. Menurut Qardawi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:

a. Pengangguran Jabariah

Pengangguran dimana seorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya, pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seorang tidak mempunyai ketrampilan, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya atau seseorang telah mempunyai keterampilan tetapi tidak digunakan karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.

b. Pengangguran Khirariyah

Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalasmalasan hingga menjadi beban orang tua. Dia tidak pernah mengusahakan suatu pekerjaan dan mempunyai pribadi yang lemah hingga menjadi sampah masyarakat.³⁵

³⁵Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2014), h.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat At-taubah: 10

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalahkamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat ini memerintahkan untuk bekerja secara umum, yaitu kerja untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Setiap melakukan pekerjaan selalu didasarkan pada niat, keikhlasan dan keyakinan sehingga akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan.

Pengangguran dikaitkan dengan kerja jelas bahwa berbagai ayat Al Qur'an dan Perkataan Nabi SAW. Allah SWT telah menciptakan siang dan malam hari saling bergantian sehingga manusia dapat mencari penghidupan di siang hari dan beristirahat di malam hari. Manusia diberikan kesempatan yang banyak sebagaimana yang dikatakan dalam Qs. Al-Mulk : 15 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*³⁶

Mencari nafkah merupakan jalan utama untuk mengatasi kemiskinan. Ia adalah sarana pokok untuk memperoleh kekayaan serta merupakan faktor dominan dalam memakmurkan dunia. Dalam Islam, seorang buruh tidak boleh dihalang-halangi untuk menerima upah kerjanya. Bahkan ia harus menerima upah sebelum keringatnya kering. Islam memberikan motivasi yang mendorong gairah kerja dan berusaha, serta menggugah kesadaran untuk bepergian di atas permukaan bumi ini.

Sebagaimana tertera dalam firman Allah Qs. Al-Jum'ah : 10 sebagai berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*³⁷

Berdasarkan ayat diatas, terlihat bahwa Allah menghendaki umat Islam untuk bekerja keras dalam mencari karunia atau rezeki dari Allah tidak menjadi pengangguran. Islam memandang bahwa bekerja adalah bagian dari kewajiban dalam kehidupan. Dengan

³⁶ *Op. Cit*, h. 319

³⁷ *Op. Cit*, h. 338

bekerja manusia dapat mengambil manfaat dari kehidupan dan manfaat dari masyarakat menanam padi, rumah harus dibuat dari bata, pasir, semen, kayu dan lain-lain. Serta memerlukan keahlian, ilmu diperoleh harus dengan belajar. Nabi SAW juga mendorong semua orang yang bertubuh sehat dan tidak cacat untuk mencari penghasilan hidup dan berhenti meminta bantuan orang-orang lain kecuali bila ada keadaan putus asa. Agama dengan tegas tidak menerima secara baik terhadap perilaku orang-orang yang cenderung bergantung pada derma orang lain padahal mereka itu mampu untuk mencari nafkah hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan usaha mereka sendiri.

B. Konsep Upah Minimum

1. Dasar Hukum Upah Minimum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.78 Tahun 2015, Upah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³⁸

³⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 tahun 2015, tentang pengupahan, BAB IV, pasal 1

Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam pasal 41-50 Undang-undang no. 78 Tahun 2015. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1-2 terdiri atas:³⁹

- a. Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman .
- b. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas: (1) Upah tanpa tunjangan dan (2) Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Komponen dan pelaksanaan tahap pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.⁴⁰

Pemerintah menetapkan upah minimum yang diatur pemerintah yang ide awalnya merupakan jarring pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah dengan harapan kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekati terjangkau. Namun kenyataannya upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja sehingga

³⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang pengupahan, BAB IV, Pasal 41

⁴⁰Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika:2009) h. 109

belum berhasil menciptakan hubungan industrial seperti yang diharapkan.

2. Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah minimum di Indonesia Penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap tahun yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yaitu kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Penetapan upah minimum Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur. Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$U_{mn} = U_{Mt} + \{U_{Mt} \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

Keterangan:

U_{mn} = Upah minimum yang akan ditetapkan

U_{Mt} = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari september tahun yang lalu sampai dengan periode september tahun berjalan

ΔPDBt = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun

berjalan.⁴¹

⁴¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan, BAB V, Pasal 43-45

3. Teori Upah

a. Teori Malthus⁴²

Salah seorang tokoh mazhab klasik ini meninjau upah dalam kaitannya dengan perubahan penduduk. Jumlah penduduk merupakan faktor strategis yang di pakai untuk menjelaskan berbagai hal. Oleh karena itu, tingkat upah yang terjadi adalah karena hasil bekerjanya permintaan dan penawaran. Sudut pandang kaum klasik bertitik tolak dari sisi penawaran (*supply side economics*) yang akhir-akhir ini menjadi populer lagi. Tingkat upah sebagai harga penggunaan tenaga kerja, juga banyak ditentukan oleh penawaran tenaga kerja, seperti diutarakan di muka bahwa sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang sudah barang tentu bersumber dari penduduk.

Bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini menekan tingkat upah. Sebaliknya pun secara simetris tingkat upah akan menaik bila penduduk berkurang sehingga penawaran tenaga kerja pun berkurang. Oleh karena itu, dilihat dari sisi lain usaha menaikkan tingkat upah tidak akan ada faedahnya dalam jangka panjang sebab bila upah lebih tinggi dari semula, diperkirakan orang akan menjadi makmur sehingga ada kecenderungan untuk tidak ragu-ragu untuk mempunyai keluarga besar.

⁴²Br Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), h. 150

Sebaliknya, bila ada usaha untuk menurunkan tingkat upah, maka kemakmuran akan berkurang. Penurunan kemampuan ekonomis ini akan mendorong orang untuk berhemat. Orang tidak mampu mempunyai keluarga besar dan memilih sedikit jumlah anak, berkurangnya jumlah penduduk akan mengangkat tingkat upah ke atas menuju ke tingkat semula. Jadi, dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan akhirnya selalu kembali ke tingkat semula.

b. Teori Jhon Stuart Mills⁴³

Mills adalah seorang tokoh mazhab klasik yang pendapatannya dapat menyimpulkan bahwa tingkat upah juga tidak akan beranjak dari tingkat semula, namun dengan alasan yang berbeda. Menurutnya, dalam masyarakat tersedia dana upah (*wage funds*) untuk pembayaran upah. Dunia usaha menyediakan sebagian daridananya yang diperuntukkan bagi pembayaran upah. Pada saat investasi sudah dilaksanakan, jumlah dana tersebut sudah tertentu. Jadi tingkat upah tidak dapat berubah jauh dari alokasi tersebut. Dari dua tokoh klasik ini dapat disimpulkan ada kesan pesimisme bahwa tingkat upah hanya akan berkisar pada tingkat yang rendah.

Seberapa tingkat yang rendah tersebut, yaitu tingkat yang dapat mempertahankan kehidupan. Mempertahankan mempunyai

⁴³*Ibid.*

implikasi mengacu pada apa yang ada atau yang lalu. Bila yang lalu rendah, maka yang akan datang rendah. Masa dimana pendapatan ini berkembang secara kebetulan bertepatan dengan terjadinya revolusi industri yang menyerap tenaga kerja secara massal dengan upah rendah. Disamping karena rendahnya keterampilan mereka, hal ini juga karena sikap kurang begitu menghargainya pemimpin usaha terhadap peranan tenaga kerja.

c. Teori kelompok Neoklasik⁴⁴

Masih termasuk klasik karena sependapat dengan mereka tentang pentingnya kebebasan berusaha. Pembaruan yang diajukan antara lain terletak pada perubahan dalam sikap yang meninggalkan pesimisme. Inti usulan yang diajukan adalah bahwa tingkat upah dapat saja tinggal asal sesuai dengan produk marginalnya. Menurut mazhab ini tingkat upah cenderung untuk sama dengan nilai pasar dari produk marginal.

Mazhab ini memberi kemungkinan bahwa tenaga kerja pada tingkat mikro tidak homogen. Karena tingkat upah juga tidak sama untuk semua tenaga kerja. Setiap tingkat kualitas tenaga kerja terdapat satu tingkat produk marginal dan satu tingkat upah. Kualitas tenaga kerja merupakan dasar bagi pencapaian produktifitas. Kualitas ini tergantung atas modal insani yang disikan kedalam diri tenaga kerja. Makin banyak modal yang

⁴⁴*Ibid.*, h. 150-151

masuk, makin tinggi kualitasnya, modal yang dimaksud terdiri atas pendidikan latihan, pengalaman kerja dan kesehatan mereka. Jalan pikiran mazhab neoklasik ini masih mendominasi jalan pikiran sekarang. Modifikasi sana-sini sudah barang tentu ada, namun pada prinsipnya menggunakan prinsip dasar ini.

4. Upah Minimum dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan pandangan umat islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang memperkerjakan untuk membayarnya. Dalam Islam upah disebut juga dengan *ujrah* yang dihasilkan dari akad Ijarah. Menurut ulama⁴⁵ Hanafiyah Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Dalam al-Quran upah didefinisikan secara menyeluruh dalam sebuah ayat:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عَلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan." (Q.S. At-Taubah 105)⁴⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut konsep Islam, upah terdiri dari dua bentuk, yaitu upah dunia

⁴⁵Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2007),

dan upah akhirat. Dengan kata lain, ayat tersebut diatas mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan imbalan yang berupa pahala di akhirat. Imbalan materi yang diterima seorang pekerja di dunia haruslah adil dan layak, sedangkan imbalan pahala di akhirat merupakan imbalan yang lebih baik yang diterima oleh seorang muslim dari Tuhan-nya.⁴⁶ Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang telah ada, upah atau gaji ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang. Dengan demikian upah tidak bergantung pada faktor penawaran dan permintaan tenaga kerja seperti yang ada pada sistem ekonomi modern.

Teori afzarul rahman, bahwa sebuah negara sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya. Tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan sesuatu tingkat kehidupan yang wajar dan tidak akan pernah membolehkan pemberian upah yang berada dibawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Rasulullah SAW senantiasa menasehati para sahabat beliau agar memberlakukan pelayan-pelayan mereka dengan baik dan memberi mereka upah yang cukup dan layak.

⁴⁶ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam". *Jurnal Equilibrium*, Volume 1, No.2, (Desember 2013), h. 251-256

C. Konsep Jumlah Penduduk

1. Pengertian Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan menurut Said (2001), yang dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Simon dalam Todaro (2000) mengemukakan bahwa penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara maju maupun yang sedang berkembang. Pada umumnya perkembangan penduduk di negara sedang berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Dan masalah jumlah penduduk menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan.

Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa ada tujuh konsekuensi negatif dari jumlah penduduk, yakni berdampak terhadap

pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional, distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.⁴⁷

2. Dampak Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam konteks pembangunan mempengaruhi belanja daerah, jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan atau sebagai pemacu pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai penghambat pembangunan.⁴⁸ Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk.⁴⁹

Permasalahan yang sering terjadi dalam pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi.⁵⁰ Dengan keadaan yang demikian di mungkinkan pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan

⁴⁷ Suprianto, Binar Dwiyanto, Pamungkas, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No.2 (Agustus 2017), h. 190-191.

⁴⁸ Andri Devita, Arman Delis, Junaidi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol 2, No. 2 (Desember 2014), h. 65.

⁴⁹ Mulyadi, "Ekonomi Sumberdaya Manusia dalam Perspektif Pembangunan", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 15

⁵⁰ Subandi, "Ekonomi Pembangunan", (Bandung Alfa Beta, 2014), h. 99

efektif. Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang.

Pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk. Sekalipun *output* meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan perekonomian. Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan.

Simon juga mencatat bahwa, pertumbuhan penduduk juga merangsang pembangunan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk

akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan selanjutnya akan mendorong “*economic ofscale*” dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi.⁵¹ Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Semakin besar ukuran pemerintahan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda.⁵²

3. Menentukan Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa mendatang. Laju pertumbuhan penduduk geometrik menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Rumus laju pertumbuhan penduduk geometrik adalah sebagai berikut:⁵³

$$P_t = P_o (1 + r)^t$$

⁵¹Evi Andriani, Sri Indah Handayani, “Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Marangin”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 8, No. 2 (Juli 2008), h. 2.

⁵²Muhammad Iqbal, Amries Rusli Tanjung, Supriono, “Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk terhadap Kelemahan Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah (Studi empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Riau dan Sumatra Barat)”. *JOM Fekom*, Vol 4, No. 1 (Februari 2017), h. 886-887

⁵³Wali Ayu Rumbia, “Proyeksi Penduduk Berlipat Ganda di Kota Bau-Bau” *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-Unhalu*, Vol. 2, No. 1 (Desember 2008), h. 2-3

Keterangan :

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jangka waktu

r = laju pertumbuhan penduduk

4. Jumlah Penduduk dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pandangan islam sesungguhnya lebih mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas ketimbang keturunan yang kuantitasnya (jumlah) banyak. Kendati dalam satu riwayat, nabi mengatakan bahwa ia bangga dengan umat yang banyak (*anamukasirun bikum al-anbiya*). namun hadis ini tetap harus dibaca dalam konteks kualitas. Jumlah yang banyak tidak berkontribusi pada pembangunan peradaban yang damai dan sejahtera. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*(Q.S. An-Nisa : 9)⁵⁴

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan

⁵⁴ Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2007),

kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.⁵⁵ Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Al-Quraisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

*Artinya: 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini (Ka'bah). 4. Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Q.S. Al-Quraisy : 3-4)*⁵⁶

D. Hubungan Upah Minimum, Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran

1. Hubungan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran

Upah memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Pengaruh positifnya yaitu dimana kenaikan tingkat upah

⁵⁵Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Jurnal Equilibrium*, Vol 3, No. 2 (Desember 2015), h. 381-390

⁵⁶Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2007),

akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan kenaikan harga produk. Kenaikan harga produk tersebut akan mendapatkan respon negative dari konsumen sehingga konsumen mengurangi pembelian. Kondisi tersebut menyebabkan produsen mengurangi produksi dan akan berpengaruh terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja pada akhirnya pengangguran akan meningkat. Sedangkan pengaruh negative disini yaitu dapat dilihat dari jumlah penawaran tenaga kerja, karena kenaikan tingkat upah akan menyebabkan penawaran kerja meningkat sehingga tingkat pengangguran berkurang.

Pernyataan ini diperkuat dengan teori Mankiw, dijelaskan bahwa upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja telah menyesuaikan diri guna menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Efek yang paling terasa dari kebijakan penetapan upah minimum adalah tingkat upah yang semakin tinggi yang dikarenakan perusahaan harus menaati kebijakan pemerintah sehingga otomatis perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja. Teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi upah maka akan mengurangi tenaga kerja dan akan meningkatkan tingkat pengangguran dimana yang diminta oleh perusahaan karena besarnya biaya yang dikeluarkan dan sebaliknya ketika upah rendah perusahaan akan menarik banyak tenaga kerja.

2. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap tingkat Pengangguran

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Semakin maraknya pertumbuhan penduduk disuatu wilayah maka akan semakin banyak masyarakat yang menganggur atau yang tidak mempunyai pekerjaan karena lapangan kerja yang tercipta tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya.⁵⁷ Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi disuatu wilayah diindikasikan akan mempengaruhi ketersediaan lahan tempat tinggal, kebutuhan hidup dan melimpahnya tenaga kerja. Jika hal ini tidak bisa dikendalikan dengan baik maka akan berdampak buruk bagi perekonomian, tingkat pengangguran akan semakin tinggi. Pernyataan ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan, jumlah tenaga kerja akan melimpah.⁵⁸ Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai referensi perbandingan dalam penelitian antara lain:

1. Muhammad Nurcholis. "Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap

⁵⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 70

⁵⁸ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Edisi kedua* (Jakarta: Kencana, 2006) h. 245

tingkat pengangguran di Provins Jawa Timur tahun 2008-2014".

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.⁵⁹

2. Nirmala Mansyur, Daisy Engka, dan Steva Tumangkeng. "*Analisis upah terhadap pengangguran di kota manado 2003-2012*". Universitas Ratulangi, Manado. Berdasarkan hasil peneitian menunjukkan bahwa variabel upah (UMP) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Manado. Temuan ini sesuai dengan teori jika upah meningkat maka pengangguran akan menurun.⁶⁰
3. Julianti Maria Marpaung. "*Pengaruh migrasi dan upah minimum terhadap tingkt pengangguran di kota pekanbaru tahun 2000-2014*". Universitas Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dengan variabel migrasi masuk memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru artinya jika variabel migrasi masuk mengalami peningkatan maka tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan. Sedangkan variabel upah minimum memiliki hubungan negatif

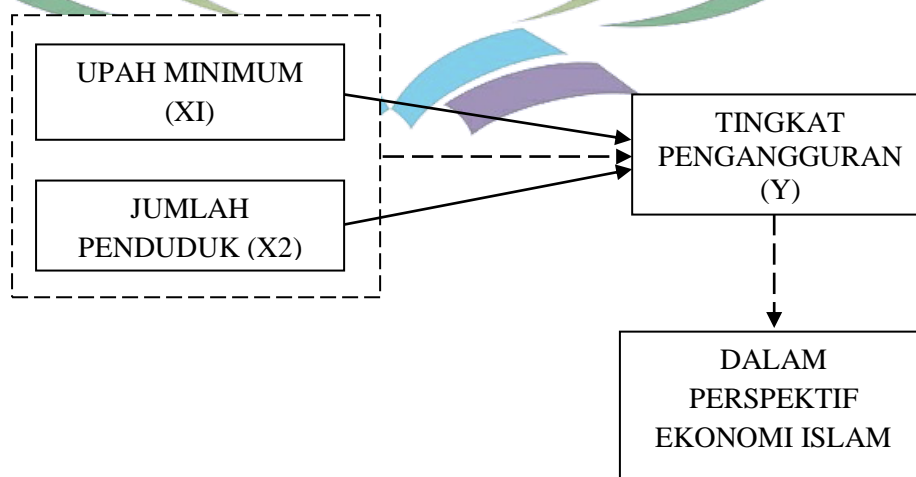
⁵⁹Muhammad Nurcholis. "Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2014". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol.12, no. 1 (Juni 2014)

⁶⁰Nirmala Mansyur, Daisy Engka, dan Steva Tumangkeng. "Analisis upah terhadap pengangguran di kota Manado 2003-2012". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 14, no.2 (Mei 2014)

terhadap tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru. Artinya jika upah minimum mengalami peningkatan maka tingkat pengangguran mengalami penurunan. Secara simultan, variabel migrasi masuk dan upah minimum memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru tahun 2000–2014. Secara parsial, variabel migrasi masuk memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel upah minimum memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan.⁶¹

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas yang membedakan dengan penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh upah dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung kemudian pembahasan tersebut ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Kerangka Berfikir



Gambar 1
Kerangka Pikir

⁶¹Julianti Maria Marpaung. "Pengaruh migrasi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di kota pekanbaru tahun 2000-2014". *Jurnal Fekon*, vol.4, no.1 Februari 2014 40
Samuel Randy Tapparan. "Pengaruh upah minimum dan investasi terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Kantor*, vol.4, no.1 2017

Keterangan:

- : Analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana untuk melihat secara persial pengaruh variabel yaitu upah minimum (X_1), jumlah penduduk (X_2) terhadap variabel dependen yaitu pengangguran (Y) dalam perspektif ekonomi islam.
- : Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji simultan untuk melihat pengaruh variabel yaitu upah minimum (X_1), dan jumlah penduduk (X_2) sekaligus terhadap variabel dependen yaitu pengangguran (Y) dalam perspektif ekonomi islam.

G. Hipotesis

1. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan. Sebuah perekonomian selalu mengalami pengangguran dijelaskan oleh teori upah efisiensi (*efficiency teages*). Menurut teori ini, perusahaan beroperasi lebih efisien jika upah berada ditingkat ekuilibrium. Akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk mempertahankan upah tetap tinggi meskipun penawaran tenaga kerja berlebihan.

Pengangguran disebabkan oleh upah yang berada diatas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dengan permintaan. Namun, ada satu perbedaan lain. Peraturan upah minimum dan serikat pekerja mencegah perusahaan menurunkan upah meskipun penawaran pekerja berlebihan. Teori upah efisien menyatakan bahwa dalam banyak kasus, konstrain semacam itu tidak diperlukan karena perusahaan-perusahaan

juga berkepentingan mempertahankan upah diatas tingkat ekuilibriumn.⁶² Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu “Analisis upah terhadap pengangguran dikota Manado 2003-2012” hasil pengujian menunjukan bahwa dalam variabel upah memberi pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di kota Manado.

Berdasarkan penjelasan teori dan pengaruh upah terhadap tingkat pengangguran maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_0 : Upah Minimum tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

H_1 : Upah Minimum berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Lampung.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Semakin maraknya pertumbuhan penduduk disuatu wilayah maka akan semakin banyak masyarakat yang menganggur atau yang tidak mempunyai pekerjaan karena lapangan kerja yang tercipta tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya.⁶³ Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi disuatu wilayah diindikasikan akan mempengaruhi ketersediaan lahan tempat tinggal, kebutuhan hidup dan melimpahnya tenaga kerja. Jika

⁶²N. Gregory Mankiw, *Op. Cit.* h. 240

⁶³Sadono Sukirno, *Op. Cit.* h. 70

hal ini tidak bisa dikendalikan dengan baik maka akan berdampak buruk bagi perekonomian, tingkat pengangguran akan semakin tinggi.

Pernyataan ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan, jumlah tenaga kerja akan melimpah.⁶⁴ Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu "*Pengaruh upah dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di kota Makasar*" hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di kota Makasar.

Dari penjelasan teori dan pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_0 : Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

H_1 : Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Lampung

3. Pengaruh Upah Minimum Dan Jumlah Penduduk Signifikan Terhadap Pengangguran Di Provinsi Lampung.

Dari penjelasan teori dan pengaruh antara Upah Minimum dan pertumbuhan penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan maka

⁶⁴Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Edisi kedua* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 245

dapat disimpulkan hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H_0 : Upah Minimum dan Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

H_1 : Upah Minimum dan Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.



DAFTAR PUSTAKA

- Al kafaar, Zaky, Abdullah, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia Bandung, 2002.
- Anto, Pendi, “*Analisis Tingkat Pengangguran Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dikota Pontianak*” pada tahun 2008-2012 (Skripsi Program Fakultas Ekonomi 2014).
- Basyir, Azhar, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah (hukum perdana islam)* UII press, Yogyakarta, 2000.
- Case, Kerl E. Dan Ray C. Fair *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Edisi Kelima, Cetakan Kesatu. (Jakarta: PT. Indeks. 2004) dan peraturan terkait lainnya, 2011 Edisi kedua, (Penerbit Ghalia Indonesia,2011)
- Gregory, Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga,(Jakarta: Salemba Empat 2006).
- Ismuninggar, Putri, Dewi, Pramita, “*Analisis pengaruh inflasi, pdrb, upah, jumlah unit usaha, jumlah penduduk terhadap pengangguran di propinsi jawa tengah*” tahun 1984-2007.(Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)
- Khakim, Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003*,(Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Lincolin, Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 2004)
- Nanga, Muana, *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Perdana. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001)
- Ni Nyoman Setya Ari Wijayanti dan Ni Luh Karmini, *Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayaba vol.3 (oktober 2014).
- Rusli, Hardijan, *Hukum ketenagakerjaan berdasarkan UU No.13/2003* tentang ketenagakerjaan.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung, Alfabeta, 2010).

Sukirno, Sadono, *Makroekonomi Modern : perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru/ oleh Sadono Sukirno*(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2000).

Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008).

Sunaryo, Adi, Adiwimarta, Sukesi, Sri dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Widjajakusuma, Kabaret Muhammad dan Yusanto, Ismail, Muhammad, *Menggagas Bisnis islam, gema Insani*. Jakarta.2002.

Wijaya, Mirna, Rizki, Radewa, “*Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Populasi Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka*” (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012),(Skripsi Program Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014)

